

E-KAMUS HUKUM



BOOK



*Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Karawang*



KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya, Kamus Istilah Hukum ini dapat disusun sebagai salah satu bentuk aktualisasi Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil (Latsar CPNS) pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Karawang.

Penyusunan kamus ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mudah dan seragam terhadap berbagai istilah hukum yang sering digunakan dalam produk hukum daerah.

Kamus ini diharapkan dapat menjadi referensi praktis bagi aparatur, akademisi, maupun masyarakat umum dalam memahami istilah-istilah hukum yang sering muncul dalam peraturan daerah, keputusan kepala daerah, maupun dokumen hukum lainnya.

Penyusun menyadari bahwa kamus ini masih memiliki keterbatasan, sehingga kritik dan saran sangat diharapkan demi penyempurnaan pada penyusunan berikutnya. Semoga karya sederhana ini dapat memberikan manfaat dan menjadi salah satu kontribusi nyata dalam mendukung peningkatan pelayanan informasi hukum di Kabupaten Karawang.

Karawang, 13 November 2025

Penyusun

Bagian Hukum,
Sekretariat Daerah
Kabupaten Karawang

*Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Karawang*

☎ 0267-429800

✉ jdiH@karawangkab.go.id

📍 Jl. Ahmad Yani, No.1
Kabupaten Karawang



GEEN STRAF ZONDER SCHULD

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iii
A	1
N	30
B	6
O	31
C	8
P	33
D	10
Q	36
E	12
R	37
F	14
S	38
G	17
T	40
H	19
U	42
I	21
V	43
J	23
W	44
K	25
X,Y,Z	45
L	27
Daftar Pustaka	46
M	29



Absah	Sah Menurut Undang-Undang.
Abus	Penyalahgunaan.
Abus De Droit	Penyalahgunaan hak dalam hukum perdata.
Actionaris	surat janji membayar yang mempunyai sifat seperti uang.
Activa	Yang Menguntungkan.
Adagium	Semboyan.
Administrasi	Tata usaha hukum administrasi = Hukum tata pemerintah.
Administration Of Law	Administrasi Kehakiman.
Advies	Nasihat.
Adviseur	Penasehat.
Advokasi	Tindakan untuk mempermasalahkan suatu hal/ide/topik.
Ajudikasi	Penyelesain perkara/sengketa di pengadilan; pengambilan Keputusan.
Advokat	Orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. https://jdih.karawangkab.go.id/admin/documents/eyJpdil6lk93bC8wbXZtZ1pkU1A2dTlYrOWIDdFE9PSIsInZhbnVlIjoibIA4NmllcXAvM2ExbGRteU5oWlFCQT09IiwibWFjIjoimZdkMzAxNjZlYzE4NTcxZWMON2U1N2U2NWl4MGQwMTRmNGUzNDY3YTg2ODZkNzg2MzNhZTE4M2lyNjk0YTUyYiIsInRhZyI6IiJ9/approval

Akta	Suatu tulisan yang dibuat dengan sengaja untuk dijadikan bukti tentang suatu peristiwa dan ditandatangani oleh pembuatnya.
Alat Bukti	Alat yang sudah ditentukan didalam hukum formal, yang dapat digunakan sebagai pembuktian didalam acara persidangan.
Alibi	bukti bahwa tersangka berada ditempat lain pada saat perbuatan hukum terjadi.
Amnesti	Pernyataan umum yang memuat pencabutan semua akibat pemidanaan dari suatu perbuatan pidana tertentu.
Aparatur Hukum	Mereka yang memiliki tugas dan fungsi: Penyuluh hukum, penerapan hukum, pebegakan hukum, dan pelayanan hukum
Appeal	Naik Banding.
Autentikasi	Proses untuk memastikan keaslian atau kebenaran sesuatu, baik dokumen, identitas, data maupun Tindakan seseorang.
Administrasi Hukum	Pengelolaan kegiatan hukum secara tertib dan terdokumentasi..
Arsip Produk Hukum	Kumpulan naskah hukum yang telah disahkan.
Arsip Elektronik Hukum	Arsip hukum dalam bentuk digital.
Analisis Hukum	Kajian terhadap isi dan dampak suatu peraturan..
Anotasi Hukum	Catatan singkat untuk menjelaskan pasal atau istilah hukum..
Akses Informasi	Hak publik untuk mengetahui produk hukum daerah.
Agenda Hukum	Daftar kegiatan terkait penyusunan atau pembahasan hukum.
Audit Hukum	Pemeriksaan kepatuhan produk hukum terhadap peraturan.

Asas Undang-Undang Tidak Dapat Berlaku Surut	Peraturan perundang-undangan yang dibuat hanya berlaku pada peristiwa hukum yang terjadi setelah peraturan perundang-undangan hadir.
Asas Undang-Undang Tidak Dapat Diganggu Gugat	Menurut asas ini, undang-undang tidak dapat diuji oleh badan peradilan, melainkan oleh pembentuk undang-undang itu sendiri.
Asas Lex Superiori Derogat Legi Inferiori	Peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
Asas Lex Superiori Derogat Legi Generalis	Peraturan perundang-undangan yang bersifat lebih khusus menyampingkan peraturan perundang-undangan yang lebih umum.
Asas Lex Posteriori Derogat Legi Priori	Peraturan perundang-undangan yang berlaku belakangan membatalkan peraturan perundang-undangan yang berlaku terdahulu.
Asas Kebebasan Berkontrak	Kebebasan untuk memilih dan membuat kontrak atau perjanjian, menentukan isi kontrak atau perjanjian, dan memilih subjeknya.
Asas Konsensualisme	Asas ini menekankan bahwa pada dasarnya perjanjian dan perikatan sudah ada sejak detik tercapainya kesepakatan para pihak. Artinya, perjanjian ada sejak tercapainya kata sepakat atau konsensus antara pihak mengenai pokok perjanjian.
Asas Pacta Sunt Servanda	Masing-masing pihak perjanjian wajib melaksanakan isi perjanjian demi kepastian hukum
Asas Iktikad Baik/Good Faith	Asas iktikad baik menghendaki bahwa dalam setiap pembuatan perjanjian, para pihak memiliki kebebasan untuk menentukan isi perjanjian, dengan siapa pihak membuat perjanjian, dan setiap perjanjian selalu didasari pada asas iktikad baik, tidak melanggar peraturan perundang-undangan, serta tidak melanggar kepentingan masyarakat.
Asas Pacta Tertiis Nec Nocent Nec Peosunt	Perjanjian tidak dapat memberikan hak dan kewajiban kepada pihak ketiga.
Asas Absolut	Suatu benda hanya dapat diadakan hak kebendaan sebagaimana yang telah disebut dalam undang-undang. Hak-hak kebendaan tidak akan memberikan wewenang yang lain daripada apa yang sudah ditentukan dalam undang-undang.

Asas Dapat dipindahtangankan	Menurut asas ini, semua hak kebendaan dapat dipindahtangankan, kecuali hak pakai dan hak mendiami.
Asas Legalitas	Tidak ada tindak pidana tanpa ada Undang-undang yang mendahului.
Asas Good Governance	Prinsip ini merupakan proses penyelenggaraan kekuasaan negara dalam melaksanakan penyediaan public goods and services.
Asas Kesadaran Hukum	Asas ini dimaknai baik warga masyarakat maupun penguasa, penegak hukum harus dapat memahami, menghayati dan mematuhi hukum sesuai doktrin negara hukum yang demokratis.
Asas Kepastian Hukum	Asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan.
Asas Kemanfaatan	Manfaat yang harus diperhatikan secara seimbang.
Asas Ketidakberpihakan	Asas yang mewajibkan badan dan/atau pejabat pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif.
Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan	Asas yang mewajibkan setiap badan dan/atau pejabat pemerintahan tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan lain yang tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan dan/atau tidak mencampuradukkan kewenangan.
Asas Keterbukaan	Asas yang melayani masyarakat untuk mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.

Asas Kepentingan Umum	Asas yang mendahulukan kesejahteraan dan kemanfaatan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, selektif dan tidak diskriminatif.
Asas Pelayanan Yang Baik	Asas yang memberikan pelayanan yang tepat waktu, prosedur dan biaya yang jelas, sesuai dengan standar pelayanan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Asas Keseimbangan	Asas umum pemerintahan yang baik yang satu ini menghendaki adanya keseimbangan antara hukuman jabatan dan kelalaian seorang pegawai.
Asas Kesamaan Dalam Mengambil Keputusan	Asas ini menghendaki pemerintah agar mengambil tindakan yang sama atau tidak saling bertentangan atas kasus-kasus yang faktanya sama.
Asas Motivasi Untuk Setiap Keputusan	Asas ini menghendaki agar setiap keputusan pemerintah harus mempunyai alasan atau motivasi yang cukup sebagai dasar dalam menerbitkan keputusan. Alasan tersebut haruslah jelas, terang, benar, objektif dan adil.
Asas Keadilan dan Kewajaran	Asas keadilan dan kewajaran menuntut badan atau pejabat administrasi negara untuk memperhatikan aspek keadilan dan kewajaran dalam setiap tindakannya.
Asas Meniadakan Akibat Suatu Keputusan Yang Batal	Asas ini berkaitan dengan pegawai yang dipecat melalui surat keputusan.
Asas Kebijaksanaan	Asas ini menghendaki agar pemerintah diberikan kebebasan dan keleluasaan untuk menerapkan kebijaksanaan tanpa terpaku pada peraturan perundang-undangan formal dalam melaksanakan tugasnya.
Asas Perlindungan Atas Pandangan Atau Cara Hidup Pribadi	Asas ini menghendaki agar pemerintah melindungi hak atas kehidupan pribadi setiap pegawai negeri dan warga negara secara umum, sebagai konsekuensi negara hukum demokratis yang menjunjung tinggi dan melindungi hak asasi manusia.



Badan Hukum	Suatu badan yang dapat mempunyai harta kekayaan, hak serta kewajiban seperti orang-orang pribadi.
Banding	Suatu alat hukum yang merupakan hak terdakwa dan hak jaksa untuk memohon, supaya putusan pengadilan negeri diperiksa Kembali oleh negeri yang khusus ditunjuk untuk itu.
Bantuan Hukum	Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara Cuma-Cuma kepada penerima bantuan hukum https://jdih.karawangkab.go.id/admin/documents/eyJpdil6lk93bC8wbXZtZ1pkU1A2dTyrOWIDdFE9PSIsInZhbnHVlIjoibIA4NmllcXAvM2ExbGRteU5oWIFCQT09liwibWFjIjoibWZkdMzAxNjZlYzE4NTcxZWMON2U1N2U2NWl4MGQwMTRmNGUzNDY3YTg2ODZkNzg2MzNhZTE4M2lyNjk0YTUyYiIsInRhZyI6IiJ9/approval
Bebas Dari Segala Dakwaan	Putusan yang dijatuhkan oleh majelis hakim karena dari hasil pemeriksaan di sidang kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.
Belasting	Pajak.
Benda Sitaan	Benda yang disita oleh negara untuk keperluan proses pengadilan.
Barang Bukti/Corpus Delicti	Barang yang digunakan untuk melakukan suatu kejahatan atau hasil dari suatu kejahatan.
Batal Demi Hukum	kebatalan yang terjadi berdasarkan undang-undang, berakibat perbuatan hukum yang bersangkutan dianggap tidak pernah terjadi.
Beschiking	Ketetapan atau keputusan.
Budget	biaya / anggaran belanja.
Bulletin	Surat edaran.
Bundel	berkas.



Bagian Hukum	Unit kerja pemerintah daerah yang menangani bidang hukum.
Basis Data Produk Hukum	Sistem penyimpanan informasi hukum secara elektronik.
Berita Daerah	Media resmi pemerintah daerah untuk mengumumkan produk hukum..
Berita Acara Harmonisasi	Catatan resmi hasil pembahasan rancangan peraturan.
Berita Acara Pengundangan	Dokumen yang mencatat pengundangan produk hukum.
Bibliografi Hukum	Daftar referensi hukum yang digunakan dalam penyusunan peraturan.
Bimbingan Teknis Pegawai	Kegiatan pelatihan pegawai dalam bidang hukum.
Buku Himpunan Produk Hukum	Kumpulan produk hukum yang diterbitkan dalam satu volume.
Buku Pedoman Jdih	Dokumen acuan pengelolaan jaringan dokumentasi hukum.
Berita Pengumuman Produk Hukum	Informasi publik terkait peraturan yang baru disahkan.



Cable Act	Undang-undang yang mengatur kewarganegaraan.
Cakap	orang yang sudah dewasa, sehat akal pikiran dan tidak dilarang oleh peraturan perundang-undangan.
Cambiaal Recht	Hukum wesel.
Cash	Tunai, kontan.
Casus	Kejadian.
Chasumat	Perselisihan hukum.
Circulaire	Surat edaran.
Civiel	sipil, perdata.
Civilist	ahli dalam masalah hukum perdata.
Claim	tuntutan.
Clausule	Catatan tambahan pada suatu perjanjian.
Clementie	Keringanan; Kemurahan hati.
Client	Langganan.
Code	Kitab Undang-undang.
Code Civil	Catatan tambahan pada suatu perjanjian.
Colliisie	kitab undang-undang hukum perdata.
Comite	Langganan.
Constituante	Kitab Undang-undang.



Constitutie	Undang-undang dasar.
Catatan Harmonisasi	Ringkasan hasil penyelarasan rancangan peraturan dengan peraturan yang lebih tinggi.
Checklist Verifikasi Dokumen	Daftar periksa kelengkapan produk hukum sebelum publikasi.
Capaian Kinerja Hukum	Ukuran keberhasilan pelaksanaan program bidang hukum.
Cek Legalitas Dokumen	Proses memastikan keaslian dan keabsahan dokumen hukum.
Cek Konsistensi Naskah	Pemeriksaan kesesuaian antar pasal dalam rancangan peraturan.
Cipta Produk Hukum Daerah	Inovasi penyusunan peraturan sesuai kebutuhan daerah.
Clearing House Hukum	Forum pembahasan lintas instansi sebelum pengesahan produk hukum.
Codifikasi Hukum Daerah	Pengelompokan peraturan daerah berdasarkan bidangnya.
Cross Reference Hukum	Rujukan silang antarperaturan dalam sistem dokumentasi.
Cuti Hukum	Masa jeda penyusunan hukum karena pergantian jadwal pembahasan.



Dead	Perbuatan atau tingkah laku seseorang yang dapat menimbulkan akibat hukum.
Dading	Dakwaan.
Dagvaarden	Mendakwa.
Dakwa	Tuduhan.
Dasar Hukum	Peraturan Hukum yang melandasi suatu perbuatan.
Data	Bahan-bahan, fakta-fakta.
Debet	Hutang.
Debiteur	Si berhutang.
Decreet	Penetapan peraturan.
Deputatie	Utusan.
Derde	Pihak ke tiga.
Diktator	Adikara, seseorang yang memerintah dengan kekuasaan mutlak.
Domisili	Tempat kediaman tetap.
Duplik	jawaban tergugat terhadap replik yang diajukan penggugat.
Deelnemen	Ikut serta atau turut campur dalam tindak pidana; Ikut serta dalam melakukan perbuatan jahat.

Daftar Produk Hukum Daerah	Kumpulan seluruh peraturan yang telah diundangkan.
Database Hukum Daerah	Sistem penyimpanan elektronik untuk dokumen hukum.
Delegasi Kewenangan Hukum	Pelimpahan sebagian wewenang hukum kepada pejabat lain.
Desiminasi Informasi Hukum	Kegiatan penyebaran pengetahuan hukum kepada publik.
Digitalisasi Arsip Hukum	Proses mengubah arsip fisik menjadi bentuk digital.
Dokumen Hukum	Produk hukum yang berupa peraturan perundang-undangan atau produk hukum selain peraturan perundang-undangan yang meliputi putusan pengadilan, yurisprudensi, monografi hukum, artikel majalah hukum, buku hukum, penelitian hukum, pengkajian hukum, naskah akademis, dan rancangan peraturan perundang-undangan. https://jdih.karawangkab.go.id/admin/documents/eyJpdil6ljVLdzNDbkE2WVRLRUxiNmRtLOErZkE9PSIsInZhbHVlIjoIUmZnQ2t2NUhPeGIHczJxODhURDVIZz09liwibWFjIjoIZWMONWEzY2YxNDBjYTczMzk3NmQyM2FiZGE3ZDRiZTA3NGFjMWI3YTfkMjlhMTc4Y2M2ODQwODcwMTE1MTU3MylsInRhZyl6liJ9/approval
Dokumentasi Hukum	Penyimpanan, pengolahan, dan penyajian informasi hukum.
Dokumen Harmonisasi	Berkas resmi hasil pembahasan antarinstansi.
Dokumen Legal Review	Hasil telaah hukum terhadap rancangan peraturan.
Dokumen Pengundangan	Bukti sah bahwa peraturan telah diundangkan.
Drafting Hukum	Penyusunan rancangan peraturan menggunakan teknik hukum yang benar.



Eindvonnis	Putusan terakhir dari hakim.
Eis	Gugatan, dakwaan.
Eisen	Menuntut, mendakwa, menggugat.
Empiris	Berdasarkan pengalaman.
Essence	Inti pokok.
Etiologi	Sebab musabab.
Evenwicht	Keseimbangan.
Evidence	Bukti.
Execution	Pelaksanaan hukum.
Eyewitness	saksi mata.
Extra	Tambahan.
Extract	Salinan, petikan.
Eigondomsrecht	Hak mutlak; Hak yang paling kuat atau paling sempurna.
Executie	Pelaksana putusan pengadilan.

Edukasi Hukum	kegiatan penyebarluasan pengetahuan hukum kepada Masyarakat, termasuk melalui media digital JDIH.
Eksemplar Produk Hukum	Salinan resmi dari suatu produk hukum yang disimpan sebagai arsip dalam sisten dokumentasi hukum (JDIH).
Evidenci Hukum	Bukti/catatan yang mendukung keberadaan dan keabsahan suatu produk hukum yang diarsipkan di JDIH.
Entitas Hukum	Subjek hukum (badan/Lembaga) yang memiliki hak dan kewajiban dalam kegiatan hukum temasuk pengelolaan dokumentasi.
Evaluasi System JDIH	Kegiatan menilai sejauh mana sistem JDIH telah berfungsi efektif dalam menyediakan, memperbarui, dan menyebarkan produk hukum.
E-Document Hukum	Dokumen hukum yang disimpan dan diakses dalam format digital.
E-Harmonisasi	Proses harmonisasi rancangan peraturan secara daring melalui sistem elektronik.
Efektivitas Produk Hukum	Ukuran sejauh mana peraturan dapat diterapkan di lapangan.
Evaluasi Hukum Daerah	Penilaian terhadap pelaksanaan produk hukum daerah.
Ekspedisi Dokumen Hukum	Pengiriman dokumen hukum antarinstansi.
Etika Hukum Pemerintahan	Norma perilaku dalam melaksanakan tugas di bidang hukum.
Entri Data Hukum	Pencatatan informasi hukum ke dalam sistem JDIH.
Eksekutif Review	Telaah hukum yang dilakukan oleh pemerintah sebelum rancangan dikirim ke legislatif.
Evaluasi Implementasi Hukum	Kajian pelaksanaan produk hukum di masyarakat.



Facta	Kejadian peristiwa.
Factor	Sebab-sebab, hal.
Factum Illicitum	perbuatan melawan hukum.
Fakih	Ahli hukum.
Falsificatie	Pemalsuan.
Fatum	Nasib.
Fatwa	Putusan yang ditetapkan oleh para alim ulama.
Feit	Peristiwa, fakta.
Follow Up	Kelanjutan.
Fonds	Dana, persediaan uang.
Formeel	Resmi.
Formule	Dalil, rumus.
Forum	Pengadilan, mimbar.
Fractie Fraksi	suatu bagian badan dari perwakilan di DPR.
Fraus Legis	Pelanggaran hukum.

Fasilitasi Hukum	Bantuan atau dukungan yang diberikan untuk memperlancar penyusunan, pembinaan, dan pelaksanaan produk hukum, termasuk pengelolaan JDIH di daerah.
File Hukum	Kumpulan dokumen hukum dalam format digital yang disimpan dan dikelola melalui sistem JDIH.
Format Dokumen Hukum	Tata bentuk atau struktur penyajian dokumen hukum (seperti Perda, Perbup, SK, dan Keputusan) yang digunakan dalam sistem JDIH agar seragam.
Formulir Pendataan Produk Hukum	Lembar atau template yang digunakan untuk mencatat informasi dasar produk hukum sebelum diunggah ke sistem JDIH.
Forum JDIH	Wadah koordinasi antaranggota jaringan JDIH, baik di tingkat pusat maupun daerah, untuk membahas pengelolaan dan pengembangan sistem informasi hukum.
Feedback Pengguna JDIH	Tanggapan atau masukan dari masyarakat atau pengguna sistem JDIH sebagai dasar peningkatan layanan informasi hukum.
Filing System (Sistem Pengarsipan)	Sistem penataan dokumen hukum, baik dalam bentuk fisik maupun digital, agar mudah ditemukan kembali ketika dibutuhkan.
Formalitas Hukum	Persyaratan resmi yang harus dipenuhi agar suatu produk hukum sah dan dapat dimasukkan ke dalam JDIH.
Fasilitasi Produk Hukum	Bantuan teknis dari pemerintah provinsi terhadap rancangan peraturan kabupaten.
File Arsip Hukum	Dokumen hukum yang disimpan untuk keperluan referensi.
Format Naskah Hukum	Pola penulisan resmi peraturan sesuai kaidah perundang-undangan.
Forum Harmonisasi	Tempat diskusi antarinstansi untuk menyamakan persepsi hukum.

Forum Konsultasi Hukum

Wadah bagi perangkat daerah untuk meminta pendapat hukum.

Formulir Inventaris Produk Hukum

Lembar pencatatan data peraturan yang telah diundangkan.

Fungsi Jdih

Tugas utama jaringan dokumentasi hukum dalam penyebaran informasi hukum.

Fungsi Dokumentasi Hukum

Proses pengumpulan, pengolahan, dan publikasi dokumen hukum.

Feedback Publik Hukum

Tanggapan masyarakat terhadap produk hukum daerah.

File Sharing Hukum

Mekanisme berbagi dokumen hukum antarunit kerja.



Gedeleegerd	Yang diberi kuasa.
Geding	Pemeriksaan perkara secara singkat.
Geedagde	orang yang dituntut atau digugat dalam perkara perdata tergugat.
Geldboete	Denda yang harus dibayar sebagai hukuman.
Gepraeeconstitueerd Bewijs	Bukti-bukti yang sah menurut undang-undang.
Gerechtshof	Pengadilan tinggi.
Gerechtskosten	ongkos-ongkos biaya pengadilan.
Gewijsde	putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan mutlak dan tetap.
Gezant	Duta, wakil diplomasi.
Grasi	Pengampunan berupa perubahan, peringanan, pengurangan atau penghapusan pelaksanaan pidana kepada yang diberikan oleh presiden.
Gugatan Balik	Gugatan yang diajukan oleh tergugat Bersama-sama dalam jawabannya kepada penggugat.
Gugus Tugas JDIH	Tim yang ditunjuk untuk mengelola dan mengembangkan sistem JDIH di daerah.
Guideline Hukum	Pedoman tertulis dalam penyusunan dan pengelolaan dokumen hukum.
Glosarium Hukum Daerah	Daftar istilah hukum yang digunakan dalam produk hukum daerah.
Gerai Informasi Hukum	Tempat pelayanan informasi produk hukum bagi masyarakat.

Gradasi Kewenangan

Pembagian tingkat kewenangan antarpejabat dalam penerbitan produk hukum.

Garis Besar Kebijakan Hukum Daerah

Arah umum penyusunan peraturan daerah.

Gugatan Hukum Administrasi

Upaya hukum terhadap keputusan administrasi pemerintahan.

Garis Waktu Pengundangan

Jadwal resmi pengundangan produk hukum daerah.

Governance Document

Dokumen pengaturan tata kelola pemerintahan daerah.



Hak	Wewenang Yang dimiliki seseorang untuk mendapatkan atau berbuat sesuatu.
Hak Absolute	Hak mutlak.
Hak Amandemen	Hak untuk merubah dalam rancangan Undang-Undang Dasar.
Hak Nisbi	Hak relatif.
Hakim	Seseorang yang mempunyai fungsi memeriksa dan memutus (Mengadili) suatu perkara.
Hoge Raad	Mahkamah agung.
Honorarium	Upah suatu jasa.
Hukum Acara Perdata	Hukum acara yang melaksanakan dan mempertahankan hukum perdata materielism.
Hukum Acara Pidana	Hukum acara yang melaksanakan dan mempertahankan hukum pidana formal.
Hukum Adat	Adat atau kebiasaan yang mempunyai akibat hukum.
Hukum Fiscal	Hukum pajak.
Hukum Formal	Hukum yang memuat peraturan-peraturan yang mengatur dan mempertahankan hukum material.
Hukum Public	Hukum yang mengatur hubungan-hubungan hukum yang terjadi antara orang dengan negara; misalnya : Hukum pidana.
Hukum Waris	Hukum yang mengatur tentang apa yang harus terjadi dengan harta kekayaan seorang yang meninggal.
Hukum Yurisprudensi	Hukum yang terbentuk karena Keputusan hakim.



Harmonisasi Peraturan Daerah	Proses penyelarasan antara rancangan Perda dan peraturan yang lebih tinggi.
Himpunan Produk Hukum	Koleksi peraturan yang disusun berdasarkan jenis atau tahun.
Hubungan Tata Naskah Dinas	Sistem penataan surat dan dokumen resmi pemerintahan.
Hukum Administrasi Pemerintahan	Cabang hukum yang mengatur tindakan administrasi negara.
Hukum Daerah	Keseluruhan peraturan yang berlaku di tingkat pemerintah daerah.
Hukum Positif	Hukum yang berlaku secara resmi dan mengikat.
Hak Akses JDIH	Kewenangan pengguna untuk mengelola data hukum di sistem JDIH.
Hak Cipta Dokumen Hukum	Perlindungan atas karya penyusunan dokumen hukum daerah.
Hearing Produk Hukum	Forum konsultasi publik terhadap rancangan peraturan.
Hubungan Kerja Hukum	Koordinasi antarunit hukum dalam pelaksanaan tugas.



Illegal	Bertentangan dengan hukum.
In Casu	Dalam perkara ini, dalam hal ini.
In Duplo	Rangkap dua.
In Extensor	dengan lengkap.
In Grosso	dalam jumlah besar.
In Natura	Dalam bentuk barang.
In Originali	dalam aslinya.
Incasso	Penagihan, tagihan.
Incest	Sumbang.
Informeel	Tidak resmi.
Injunction	Putusan.
Imprisonment	Hukum penjara.
International Law	Hukum internasional.

Identifikasi Produk Hukum	Proses mengenali dan mencatat setiap produk hukum daerah.
Indeks Dokumen Hukum	Daftar sistematis berisi judul dan nomor dokumen hukum.
Informasi Publik Hukum	Data atau dokumen hukum yang dapat diakses oleh masyarakat.
Inventarisasi Peraturan Daerah	Data atau dokumen hukum yang dapat diakses oleh masyarakat.
Instruksi Kepala Daerah	Arahan resmi yang bersifat administratif dari Bupati/Wali Kota.
Integrasi Data JDIH	Penggabungan database hukum daerah dengan jaringan nasional.
Internalisasi Nilai Hukum	Penanaman nilai-nilai hukum dalam budaya kerja ASN.
Izin Administratif	Persetujuan resmi yang diberikan oleh pemerintah daerah.
Isu Hukum Strategis	Permasalahan hukum yang berdampak besar pada kebijakan daerah.
Item Dokumen	Unit terkecil dalam sistem dokumentasi hukum.



tunt
Ilmu
Men
Wew
Sarja
Petu peng kepa
seke
huku
keha
at

Jaksa Pengacara Negara (JPN)

Jaksa yang mewakili pemerintah dalam urusan hukum perdata dan tata usaha negara.

Jadwal Retensi Arsip Hukum

Ketentuan masa simpan dokumen hukum.

Jejaring Hukum Daerah

Kerja sama antarinstansi hukum daerah dalam pertukaran informasi.

Jurnal Hukum Daerah

Publikasi berkala yang membahas perkembangan hukum di daerah..

Justifikasi Hukum

Pertimbangan atau alasan yuridis dalam pengambilan keputusan..



Kadaluarsa	Lampaunya tenggang waktu yang ditetapkan undang-undang, sehingga mengakibatkan orang yang menguasai barang memperoleh hak milik.
Kaidah Hukum	peraturan yang dibuat secara resmi oleh penguasa Masyarakat atau penguasa negara, mengikat setiap orang dan berlakunya dapat dipaksakan oleh aparat Masyarakat atau aparat negara, sehingga berlakunya kaidah hukum dalam dipertahankan.
Kasasi	pembatalan putusan atas penetapan pengadilan dari semua lingkungan peradilan dalam Tingkat peradilan terakhir.
Kedaulatan	kekuasaan tertinggi.
Kewajiban	beban yang diberikan oleh hukum kepada orang ataupun badan hukum.
Killer Suspect	tersangka pembunuhan.
Killing	pembunuhan.
Klaagschrift	surat pengaduan.
Klien	langganan.
Kompeten	Berkuasa.
Kompetensi Absolut	kewenangan badan pengadilan didalam memeriksa jenis perkara tertentu dan secara mutlak tidak dapat diperiksa oleh badan pengadilan lain.
Kompromi	Jalan tengah.
Konstituante	badan pembuatan Undang-Undang Dasar.
Konstitusional	sesuai dengan Undang-Undang Dasar.
Kriminalis	ahli tentang kejahatan.

Kualifikasi Gugatan	suatu perumusan mengenai perbuatan materiil maupun formal dari tergugat, yang dapat berupa perbuatan melawan hukum, dan lain-lain.
Kuasa Hukum	pihak yang diberikan kewenangan untuk melaksanakan proses hukum di muka pengadilan.
KUHAP	Undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang kitab undang-undang hukum acara pidana.
Konsultasi Hukum	Layanan pemberian pendapat hukum kepada perangkat daerah.
Koordinasi Produk Hukum	Penyesuaian antarunit dalam proses penyusunan peraturan.
Kearsipan Hukum	Pengelolaan arsip dokumen hukum secara sistematis.
Katalog Produk Hukum	Daftar sistematis berisi koleksi produk hukum daerah.



Laesus	Orang yang dirugikan.
Law And Order	Hukum dan tata tertib.
Law Breaker	Pelanggaran hukum.
Law Court	pengadilan (hukum) / kantor pengadilan.
Law Enforcement	pelaksanaan hukum.
Law Of Criminal Procedure	hukum acara pidana.
Law Of Evidence	hukum pembuktian.
Law Of Procedure	hukum acara.
Lawbook	Buku hukum.
Lawmaker	Pembuat Undang-Undang.
Lawmaking Body	Badan legislatif.
Lawsuit	Perkara hukum.
Lawyer	Pengacara.
Legaal	Sah menurut ketentuan Undang-undang.
Legal Order	Tata hukum.
Legally	Menurut hukum.
Legatie	Kedutaan.
Legist	Ahli hukum.
Legitimatie	pengesahan.

Lembaga Negara	Penerbitan resmi negara yang memuat semua UU baru untuk diumumkan agar resmi diketahui oleh umum.
Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban	Lembaga yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada saksi dan / korban sebagaimana diatur dalam UU nomor 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban.
Lex scripta	UU hukum yang tertulis.
Litigasi	Proses penanganan perkara hukum yang dilakukan melalui jalur pengadilan untuk menyelesaikannya. https://jdi.karawangkab.go.id/admin/documents/eyJpdil6lk93bC8wbXZtZ1pkU1A2dTYrOWIDdFE9PSIsInZhbHVlIjoibla4NmllcXAvM2ExbGRteU5oWIFCQT09liwibWFjIjoimZdkMzAxNjZlYzE4NTcxZWMON2U1N2U2NWl4MGQwMTRmNGUzNDY3YTg2ODZkNzg2MzNhZTE4M2lyNjkOYTUyYiIsInRhZyl6liJ9/approval
Litigant	Pihak yang sedang berperkara.
Legal Drafting	Proses penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan.
Legal Review	Kajian hukum terhadap produk atau rancangan peraturan.
Lembaran Daerah	Media resmi untuk mengundang peraturan daerah.
Lampiran Produk Hukum	Dokumen tambahan yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari peraturan.
Layanan Informasi Hukum	Pelayanan publik yang memberikan akses terhadap dokumen hukum.



Machtiging	Pemberian kuasa.
Magistraat	jaksa penuntut umum.
Mahkamah	Pengadilan.
Mahkamah Agung	pengadilan tertinggi dalam NKRI.
Mahmitli	sama dengan mahkamah militer tertinggi.
Majelis	dewan.
Majlis Hakim	pimpinan sidang pengadilan yang terdiri dari lebih satu orang hakim yaitu seorang ketua dan beberapa orang hakim.
Mandat	Surat kuasa.
Mandataris	Orang yang diberi kuasa. Misalnya presiden Adalah mandataris MPR.
Manifest	Maklumat, pernyataan.
Masalah	Masalah hukum, persoalan.
Meeting	pertemuan, sidang rapat.
Meja Hijau	pengadilan.
Memori Kasasi	Alasan yang diberikan pemohon kasasi dalam mengajukan Upaya hukum kasasi.
Military Law	Hukum militer.
Monografi Hukum	Karya tulis yang membahas satu topik hukum tertentu secara mendalam.
Monitoring Produk Hukum	Kegiatan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan.
Metadata Hukum	Informasi pendukung yang menjelaskan isi dokumen hukum.



Naakt	Kebenaran yang sebenarnya.
Nasabah	Relasi.
Navordering	Tagihan susulan.
Negotiation	Rundingan.
Negotium	Perbuatan hukum.
Notulen	Catatan dalam sidang mengenai apa2 yang diputuskan.
Novum	Yang baru dikemukakan atau baru muncul kemudian.
Norma	Norma yang dibuat oleh lembaga berwenang dan memiliki kekuatan memaksa, sehingga pelanggaran dapat dikenai sanksi.
Naskah Akademik	Dokumen ilmiah sebagai dasar pembentukan peraturan daerah..
Nomor Register Produk Hukum	Kode unik yang diberikan pada setiap produk hukum.
Nota Dinas Hukum	Surat resmi internal berisi pendapat hukum..
Norma Hukum Daerah	Kaidah atau aturan yang mengatur perilaku masyarakat di tingkat lokal.
Notulen Rapat Hukum	Catatan hasil pembahasan penyusunan produk hukum.



Observatie	Pemeriksaan, peninjauan, penyelidikan.
Observe The Law	Mematuhi hukum.
Offender	Pelaku, pelanggar.
Offense	Kejahatan, pelanggaran.
Omkopping	Penyogokan yang diberikan kepada seorang pejabat.
Ommissiedelict	Tindak pidana yang disebabkan suatu kelalaian.
Onbeedign	Tidak disumpah.
Onbevoegd	Tidak mempunyai wewenang.
Onbewust	Tidak disengaja, diluar kesadaran.
Onderhans	Di bawah tangan.
Onderzoek	Pemeriksaan, penyelidikan, pengusutan.
Onerus	Hal yang memberatkan.
Ongeldig	Tidak berlaku, tidak berharga.
Onlogis	Tidak masuk akal sehat.
Onschuldig	Tidak bersalah.
Ontbinden	Memutuskan.
Oordeel	Vonis, Keputusan hakim.
Open Trial	Pengadilan terbuka.

otentikasi Dokumen Hukum

Proses pengesahan keaslian dokumen hukum.

Optimalisasi JDIH

Upaya meningkatkan kinerja dan layanan informasi hukum.

Organisasi Pengelola Hukum

Struktur organisasi yang bertanggung jawab di bidang hukum daerah.

Output Produk Hukum

Hasil akhir dari proses penyusunan hukum.

Otorisasi Pengguna

Pengaturan hak akses terhadap sistem JDIH.



Panitera	Pejabat pengadilan yang salah satu tugasnya Adalah membantu hakim dalam membuat berita acara pemeriksaan dalam proses persidangan.
Parole	Pembebasan bersyarat.
Pembebasan Bersyarat	Bebasnya narapidana setelah menjalani sekurang-kurangnya dua pertiga masa pidananya dengan ketentuan dua pertiga tersebut tidak kurang dari 9 (sembilan) bulan.
Pembuktian	Penyajian alat2 bukti yang sah menurut hukum kepada hakim yang mmeriksa suatu perkara guna memberikan kepastian tentang kebenaran peristiwa yang dikemukakan.
Penahanan	Penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik, atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam KUHP.
Penalty	Hukuman.
Penangguhan Penahanan	Mengeluarkan tersangka/ terdakwa dari penahanan sebelum batas waktu penahanannya berakhir.
Penasehat Hukum	Seseorang yang memenuhi syarat yang ditentukan oleh atau berdasar undang-undang untuk memberi bantuan hukum.
Penetapan Hakim	Putusan hakim yang bersifat declaratoir untuk menetapkan suatu peristiwa teretentu.
Pengaduan	Pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum seorang yang telah melakukan tindak pidana aduan yang merugikan.
Penggugat	Pihak yang terdiri dari satu orang atau lebih yang mengajukan gugatan atau tuntutan hak ke pengadilan negeri yang berwenang.
Penuntut Umum	Jaksa yang diberi wewenang oleh UU ini untuk melaksanakan penuntut dan melaksanakan penetapan hakim.

Penyelidikan	Serangkaian Tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tidak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam KUHP.
Penyidikan	Serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam UU ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangka.
Penyitaan	Serangkaian Tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan.
Perjury	sumpah palsu.
Perlindungan Saksi	Pemberian jaminan keamanan terhadap saksi dengan meminta bantuan kepolisian atau penggantian identitas pelapor atau melakukan evakuasi termasuk perlindungan hukum.
Plaintiff	Penggugat.
Peraturan perundang-undangan	Peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. https://jdih.karawangkab.go.id/admin/documents/eYJpdil6ljVLdzNDbkE2WVRLRUxiNmRtLOErZkE9PSIsInZhHVIIjoiUmZnQ2t2NUhPeGIHczJxODhURDVIz09liwibWFJljoizWMONWEzY2YxNDBjYTczMzk3NmQyM2FiZGE3ZDRiZTA3NGFjMWI3YTFkMjhlMTc4Y2M2ODQwODcwMTE1MTU3MyIsInRhZyI6Ij9/approval
Proses Peradilan	suatu rangkaian acara peradilan mulai dari penindakan terhadap adanya suatu tindak pidana (sumber Tindakan) sampai pada lahirnya Keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

Putusan Berkekuatan Hukum Tetap	Putusan yang sudah tidak dilakukan Upaya hukum lagi baik banding maupun kasasi.
Putusan Insidentil	Putusan yang bersifat sementara untuk mencegah timbulnya akibat hukum yang lebih lanjut sebelum putusan dijatuhkan.
Putusan Pengadilan	pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemindaan atau bebas atau lepas dari segala hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam KUHAP.
Putusan Verstek	Putusan yang dijatuhkan oleh hakim tanpa hadirnya tergugat, meskipun telah dipanggil secara layak.
Penyusunan Peraturan Daerah	Tahapan kegiatan merancang dan menetapkan peraturan daerah.
Pengesahan Produk Hukum	Penetapan resmi suatu peraturan untuk diberlakukan.
Pengundangan	Proses resmi memberlakukan peraturan daerah.
Pendokumentasian Hukum	Proses penyimpanan dan pengarsipan produk hukum.
Publikasi Hukum	Penyebarluasan informasi hukum kepada masyarakat.



Qua	Selaku, sebagai.
Qua Ad Jus	Tentang dasar hukumannya.
Qua Amino	Dengan maksud apa.
Quantum	Banyaknya.
Quarantaine	Pengasingan untuk sementara waktu untuk mencekah suatu pengaruh buruk.
Quorum	Jumlah minimum yang harus hadir dari anggota perwakilan dalam suatu sidang agar putusan yang diambil dapat sah.
Quotiseren	Membagi sama rata.
Quotum	Jatah, bagian yang seharusnya diterima.
Quick Access JDIH	Fitur pencarian cepat dalam portal hukum daerah.
Quality Control Dokumen Hukum	Pengawasan mutu dokumen hukum sebelum dipublikasikan.
Query Pencarian Hukum	Permintaan data tertentu dalam sistem JDIH.



Raad	Majelis, mahkamah, dewan.
Raad Van State	Dewan pertimbangan agung.
Raadsman	Penasihat.
Ransom	Uang tebusan.
Rechtbank	Mahkamah.
Rechtelijk	Sesuai dengan hukum.
Rechtens	Menurut hukum.
Rechtsbeginzel	Azas hukum.
Rechtsgeldig	Berlaku.
Reconventie	Dalam memberi jawaban terhadap tuntutan, maka tergugat menggugat kembali.
Regeling	Peraturan.
Replik	Tanggapan tertulis atau lisan dari penggugat terhadap jawaban (eksepsi atau bantahan) yang disampaikan oleh tergugat dalam proses persidangan.
Right To Keep Silent	Hak tutup mulut.
Ruling	Putusan.
Revisi Peraturan Daerah	Perubahan terhadap Perda yang sudah berlaku.
Rapat Harmonisasi	Forum penyelarasan substansi rancangan peraturan.
Repositori Hukum	Tempat penyimpanan digital seluruh produk hukum.
Rencana Kerja Bagian Hukum	Dokumen perencanaan tahunan kegiatan hukum daerah.
Rujukan Hukum	Acuan peraturan yang digunakan dalam penyusunan produk hukum baru.





Sah	Menurut Undang-Undang berdasarkan Undang-Undang
Saksi	Orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.
Saksi A Charge	Saksi yang meberatkan / memberikan keterangan yang memberatkan.
Saksi A Decharge	Saksi yang meringankan / memberikan keterangan yang meringankan.
Saksi Ahli/Keterangan Ahli	Keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan.
Saksi Korban	Saksi yang mengalami kejadian dan yang dirugikan atas suatu perbuatan pidana yang dilakukan oleh orang lain.
Saksi Mahkota	Terdakwa yang bersaksi untuk terdakwa lain.
Sanggal	Menyangkal, mangkir, menyanggah, dipakai sebagai alat untuk membenarkan diri sendiri.
Sela	Putusan belum akhir.
Sentence	Putusan.
Sentence To Hang	Hukum gantung.
Sita	Suatu Tindakan yang diambil oleh pengadilan melalui penetapan hakim, atas permohonan penggugat, guna menempatkan barang (tetap/bergerak) berada dalam penguasaan/pengawasan pengadilan, sampai adanya suatu putusan yang pasti tentang suatu perkara.
Sue	Menggugat.
Suit	Gugatan.



Summons	Surat dakwa.
Supreme Advisory Council	Dewan pertimbangan agung.
Supreme Court	Mahkamah agung.
Suspect	Tersangka.
Suspension Of A Sentence	Penangguhan hukum.
Sworn Witness	Saksi yang disumpah.
Sinkronisasi Data Hukum	Penyesuaian data hukum antarinstansi atau sistem..
Standar Operasional Prosedur (Sop) Hukum	Pedoman kerja dalam pelaksanaan tugas hukum.
Surat Kuasa Hukum	Pemberian wewenang kepada pihak lain untuk mewakili secara hukum.
Sistem Informasi Hukum Daerah (Sihd)	Platform digital untuk pengelolaan produk hukum daerah.
Sertifikasi Dokumen Hukum	Proses pemberian tanda sah terhadap dokumen digital.



Take Oath	Mengambil sumpah.
Tax Law	Hukum pajak.
Terdakwa	Seorang tersangka (seseorang karena perbuatan atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana) yang dituntut, diperiksa, dan diadili di sidang pengadilan.
Tergugat	Orang atau badan hukum yang terhadapnya diajukan gugatan atau tuntutan hak oleh penggugat.
Terhukum	Seorang terdakwa terhadap siapa oleh pengadilan telah dibuktikan pemeriksaannya dimuka persidangan.
Term Of Imprisonment	Masa kurungan.
Terpidana	Seseorang yang didasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dinyatakan terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah.
Tersangka	Seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.
Testimony	Kesaksian.
The Condemned	Tahanan hukuman mati.
Tindak Pidana	Setiap perbuatan yang diancam hukuman sebagai kejahatan atau pelanggaran baik yang disebut dalam KUHAP maupun peraturan perundang-undangan lainnya.
Torture	Penyiksaan.
Traditional Law	Hukum adat.
Trial	Persidangan.



Telaah Hukum

Analisis mendalam terhadap masalah hukum tertentu.

Tim Penyusun Hukum

Kelompok kerja yang menyusun rancangan peraturan.

Tata Naskah Dinas

Ketentuan bentuk dan format surat-menyurat resmi pemerintah.

Transparansi Hukum

Keterbukaan informasi hukum kepada publik.

Template Produk Hukum

Format baku dalam penulisan dokumen hukum.



Uang Saksi	Yang diterima oleh seorang saksi.
Uitstel	Penundaan, penangguhan, pengunduran.
Ultimatum	Peringatan terakhir, tuntutan terakhir dan jika tidak dipenuhi maka akan diambil tindakan.
Unus Judex	Pengadilan yang mengadili dengan satu orang hakim.
Unwritten Law	Hukum tak tertulis.
Upeti	Pembayaran wajib.
Usus Fructus	Hak menikmati hasil.
Undangan Rapat Hukum	Surat resmi pemanggilan peserta rapat hukum.
Undang-Undang	Peraturan perundang-undangan tingkat nasional yang menjadi acuan.
Uji Materiil	Pengujian isi peraturan terhadap peraturan yang lebih tinggi.
Umpan Balik Hukum	Tanggapan atau saran atas produk hukum.
Unit Dokumentasi Hukum	Subbagian yang mengelola arsip dan dokumentasi hukum daerah.





Validatie	Pernyataan tentang sahnya sesuatu.
Valsheid	Kepalsuan
Valsheid In Geschriften	Pemalsuan surat.
Vendukantoor	Balai lelang.
Venue En Court	Pengajuan perkara dimuka pengadilan.
Verdachte	Terdakwa, tersangka.
Verdagen	Menangguhkan.
Verdic	Putusan.
Verhaal	Hak, tuntutan, kemungkinan akan mendapat Ganti rugi.
Verhoging Van Straafbbaarheid	Suatu dasar yang ada sehingga memperberat hukuman.
Verhoor	Pemeriksaan, interogasi.
Verwijzing	Penyerahan suatu perkara ke sidang.
Validasi Dokumen Hukum	Pemeriksaan keabsahan dokumen hukum sebelum diunggah.
Verifikasi Hukum	Pengecekan kebenaran substansi atau legalitas dokumen hukum.





Waarbog	Jaminan, tangguhan.
Waardepapieren	Surat-surat berharga yang dapat diperjualbelikan.
Warrant	Jaminan, surat kuasa.
Wet	Undang-Undang; dalam arti formal yaitu penetapan yang berbentuk undang-undang yang dibuat oleh badan2 legislatif.
Wetboek	Kitab Undang-Undang.
Wetgever	pembuat undang2.
Website JDIH	Portal resmi penyebarluasan produk hukum daerah.
Wewenang Hukum	Hak pejabat untuk mengambil tindakan hukum tertentu.
Workshop Hukum	Kegiatan pelatihan terkait penyusunan dan dokumentasi hukum..





Xenograaf

Ahli dalam membaca tulisan Bahasa asing.

Xenogratie

Pemerintahan dalam suatu negara yang dilakukan atau dipegang oleh orang asing.



Yurisprudensi

Suatu Keputusan hakim yang terdahulu yang diikuti oleh hakim2 lainnya dalam perkaranya yang sama.

Yurisprudensi Pembuktian

Kewajiban memberikan bukti atas dalil2 yang diungkapkan di muka pengadilan.



Zaak

Perkara, urusan, masalah, barang.

Zakenrecht

Hukum kebendaan (diatur dalam Undang-Undang hukum perdata).

Zwendelarij

Penipuan, tipu muslihat.

Zona Integritas Hukum

Wilayah kerja yang berkomitmen pada pelayanan hukum bersih.

Zero Draft Peraturan

Draf awal rancangan peraturan sebelum harmonisasi.





DAFTAR PUSTAKA

BUKU / MODUL

- Cahya Budi Kartiawan, S.Pd. 2021. *Kamus Hukum*. Bandung: CV Titian Ilmu.
- C.S.T. Kansil. 2010. *Kamus Istilah Aneka Hukum*. Bekasi: Jala Permata.
- J.C.T. Simorangkir, S.H. 2010. *Kamus Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika
- Telly Sumbu. 2010. *Kamus Umum Politik & Hukum*. Bekasi: Jala Permata.

SUMBER INTERNET

- jdih.karawangkab.go.id
- www.hukumonline.com
- www.id.wikipedia.org
- www.kbbi.web.id
- ditjenpp.kemenkumham.go.id

